BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan hubungan yang melintasi batas wilayah suatu negara. Dimana dalam kehidupan internasional, setiap negara melakukan kerjasama, diplomasi dan lain-lain dengan negara lain. Menurut Perwita dan Yani, menjelaskan Hubungan Internasional sebagai berikut:

> ”Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (2005: 3-4).

Hubungan internasional adalah hubungan yang melintasi batas negara yang dengan adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat-sekat yang ada yang menjadi penghalang para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan. Hubungan yang melintasi batas negara tersebut mencakup hubungan antara satu negara dengan negara lain, hubungan yang dibangun baik itu berupa hubungan kerjasama maupun hubungan yang bersifat konflik seperti hubungan yang dibangun oleh Palestina dan Israel. Hubungan internasional juga mencakup kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat.

Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

> “Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya

> saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar"(2005: 3-4).

Hubungan internasional adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara karena makin banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional ini menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. semakin banyaknya interdependensi menyebabkan tidak adanya satu negara didunia ini yang dapat menutup diri dari dunia luar, karena kebutuhan setiap negara makin kompleks.

Sistem internasional menjadi semakin kompleks pasca berakhirnya perang dingin, dimana selama perang dingin sistem internasional lebih fokus pada isu-isu *high politics* seperti perang, politik, keamanaan dan militer bergeser ke *low politics* seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi dan terorisme.

Karena hal-hal tersebut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (2005: 7-8).

2.2 Politik Internasional

2.2.1 Definisi Politik Internasional

Salah satu kajian pokok (*Core Subject*) dalam Hubungan Internasional adalah Politik Internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan

kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*). Apabila politik adalah studi tentang *who gets what, when, and how*, maka politik internasional adalah studi mengenai *who gets what, when, and how* dalam arena internasional.

Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Holsti menyatakan definisi dari studi politik internasional:

> "Studi politik internasional adalah studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. selain mencakup unsur power, kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional, *detterence*, dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi. "(2005: 40)

Secara umum, objek yang menjadi kajian politik internasional juga merupakan kajian politik luar negri, dimana keduanya menitikberatkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan serta unsur *power*. Suatu analisis mengenai tindakan terhadap lingkungan eksternal serta berbagai kondisi domestikyang menopang formulasi tindakan merupakan kajian politik internasional apabila tindakan tersebut dipandang sebagai salah satu pola tindakan suatu negara serta reaksi atau respon oleh negara lain. Seperti tindakan bangsa Palestina yang melakukan gerakan intifadah sebagai respon atas tindakan Israel.

Dalam interaksi antarnegara terdapat hubungan pengaruh dan *respons*. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Apapun alasannya, negara yang menjadi sasaran pengaruh yang langsung maupuntidak langsung, harus menentukan sikap melalui respons, manifestasi dalam hubungan dengan negara lain untuk mempengaruhi atau memaksa pemerintah negara lain agar menerima keinginan politiknya.

Kemudian dalam interaksi antarnegara, interaksi dilakukan didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara, baik kepentingan yang inputnya berasal dari

dalam ataupun dari luar negara yang bersangkutan. Untuk memperjuangkan tujuan dan kepentingan nasional, negara tidak dapat melepaskan diri dari kebijakannya baik yang ditujukan ke luar negara tersebut (politik luar negri) maupun ke dalam negara (politik dalam negri). Kepentingan nasional adalah tujuan utama dan merupakan awal sekaligus akhir perjuangan suatu bangsa. Kepentingan nasional dasar dibagi empat jenis, yaitu: ideologi, ekonomi, keamanan dan prestise (Perwita dan Yani, 2005: 40-41)

2.2.2 Bentuk-bentuk Interaksi

Bentuk-bentuk interaksi dapat dibedakan berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan interaksi, intensitas interaksi serta pola interaksi yang terbentuk. Dalam hubungan internasional, interaksi yang terjadi antaraktor dapat dikenali karena intensitas keberulangannya *(recurent*) sehingga membentuk suatu pola tertentu. Secara umum bentuk reaksi dari suatu negara terhadap negara lain dapat berupa akomodasi (*accomodate*), mengabaikan (*ignore*), berpura-pura seolah-olah informasi/pesan dari negara lain belum diterima (*pretend*), mengulur-ulur waktu (*procastinate*), menawar (*bargain*), dan menolak (*resist*) aksi dari negara lain.

Bentuk-bentuk interaksi berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan, antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, regional dan multilateral/internasional. Adapun yang dimaksud dengan hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan yang timbal balik antara kedua pihak. Pola-pola yang terbentuk dari dari proses interaksi, dilihat dari kecendrungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang

melakukan hubungan timbal balik tersebut, dibedakan menjadi pola kerjasama, persaingan dan konflik.

Rangkaian pola hubungan aksi-reaksi ini meliputi proses sebagai berikut:

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.

Formulasi dari pola aksi-reaksi ini memberi kesan bahwa rangkaian aksi dan reaksi selalu tertutup atau berbentuk simetris. Misalnya negara A mengeluarkan aksi terhadap negara B, maka aksi tersebut akan dipersepsikan oleh para pembuat keputusan di negara B dan selanjutnya berdasarkan hasil mempersepsikan tersebut, negara B akan memberikan respon atau reaksi atas aksi dari negara A tadi. Kemudian reaksi negara B ini kembali direspon oleh negara A berupa aksi susulan. Di dalam proses ini terdapat suatu hubungan timbal balik (*resiprokal*) (Perwita dan Yani, 2005: 42-43)

Perwita dan Yani dalam bukunya mendefinisikan politik internasional sebagai berikut:

> Istilah politik internasional pada dasarnya merupakan istilah tradisional yang sangat menekankan interaksi para aktor negara-bangsa. Dalam hal ini, kendati Perang Dingin kerap menentukan pola interaksi aktor negara-bangsa, pada era pasca perang dingin ini para penempuh studi politik internasional perlu melepaskan diri dari "*Cold War Mentality*". Sementara itu, pola-pola interaksi politik dalam Hubungan Internasional kini sudah melibatkan interaksi antara aktor negara dan aktor non-negara bangsa seperti perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah dan bahkan kelompok-kelompok non negara lainnya seperti organisasi, teroris yang kerap disebut sebagai aktor transnasional (2005: 44)

2.3 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negri suatu negara.

Dalam buku Perwita dan Yani para penganut realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

> Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional.

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negrinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005: 35)

2.4 Pengaruh

> Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu apek kekuasaan yang pafa dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Pengaruh dinyatakan secara tidak langsung oleh kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan yang menentukan *out comes*.

Menurut Rubienstein asumsi-asumsi dasar konsep pengaruh yaitu:

1. Secara operasional konsep pengaruh digunakan secara terbatas dan spesifik mungkin dalam konteks transaksi diplomatik.
2. Sebagai konsep multidimensi, konsep pengaruh lebih dapat diidentifikasikan daripada di ukur oleh beberapa kebenaran (*proposisi*). Sejumlah konsep pengaruh dapat

diidentifikasikan hanya sedikit, dikarenakan tingkah laku B yang dapat mempengaruhi A terbatas.

3. Jika pengaruh A terhadap B besar, akan mengancam sistem politik domestik B, termasuk sikap, perilaku domestik dan institusi B.
4. pengetahuan dalam mengenai politik domestik B sangat penting untuk mempelajari hubungan kebijakan luar negri antara A dan B dikarenakan pengaruh tersebut akan dimanifestasikan secara konkret dalam konteks isu area tertentu dari B.
5. Pada saat seluruh pengaruh dari suatu negara dari suatu negara dikompromikan dengan kedaulatan negara lain secara menyeluruh dan kadang-kadang dapat memperkuat atau memperlemah kekuatan pemerintah dari negara yang dipengaruhi, terdapat batasan dimana pengaruh tersebut tidak berpengaruh terhadap suatu negara atau pemimpin negara tersebut. Pemerintah B tidak akan memberikan konsesi-konsesi terhadap A yang dapat melemahkan kekuatan politik domestik kecuali bila A menggunakan kekuatan militer terhadap B.
6. Negara donor berpengaruh terhadap negara lain melalui bantuan-bantuan yang diberikannya, tidak hanya karena adanya timbal balik dari B kepada A, akan tetapi juga reaksi dari C,D,E,F,… yang dapat berpengaruh terhadap hubungan A dan B.
7. Data-data yang relevan untuk mengevaluasi pengaruh terdiri dari lima kategori:
   a. Ukuran perubahan konsepsi dan tingkah laku
   b. Ukuran interaksi yang dilakukan secara langsung (kuantitas dan kumpulan data)
   c. Ukuran dari pengaruh yang ditujukan
   d. Studi kasus dan
   e. Faktor perilaku idiosinkretik
8. Sistem yang biasa digunakan untuk menentukan pengaruh adalah dengan menggunakan variabel yang ada diantara negara-negara. Yang paling baik adalah

model yang dapat digunakan untuk tipe masyarakat dengan area geografis dan budaya yang sama.

Pengaruh dapat dijalankan melalui enam cara, yaitu:

a. Persuasi
b. Tawaran imbalan
c. Pemberian imbalan
d. Ancaman hukuman
e. Tindakan hukuman tanpa kekerasan
f. Kekerasan

Terdapat tipologi kasar mengenai Hubungan Internasional sebagaimana diidentifikasikan oleh teknik umum yang digunakan dalam tindakan pengaruh:

a. Hubungan konsensus
b. Hubungan manipulasi terbuka
c. Hubungan paksaan
d. Hubungan kekerasan

Kegiatan saling mempengaruhi, misalnya, dapat terjadi dalam aspek kehidupan manusia di antaranya aspek ekonomi dan aspek politik. Faktor-faktor ekonomi dapat mempengaruhi hasil politik begitu juga sebaliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa dinamika Hubungan Internasional umumnya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek politik (Perwita dan Yani, 2005: 31-33)

2.5 Konflik

Christ Mitchell mengartikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sementara Kenneth Boulding mendefinisikan konflik sebagai sebuah situasi berkompetensi atas potensial dimasa depan karena bertentangan dengan keinginan kelompok lainnya (1981: 41)

Baik Mitchell maupun Boulding nampaknya hanya berbicara berkaitan dengan potensi konflik yang bisa terjadi dimasa depan, dalam pengertian belum terjadi konflik terbuka, tetapi benih-benih konflik sudah ada dan itu bisa dipahami sebagai konflik.

Jika pengertian konflik menurut Mitchell dan Boulding lebih bersifat antisipatif, Burton justru melihat konflik sebagai situasi yang sudah bergerak jauh melampaui kompetisi dan sudah terjadi perilaku kekerasan yang bersifat merusak (Boulding, 1996: 17)

Perilaku kekerasan bisa dilakukan oleh individu, kelompok maupun bangsa sebagai akibat adanya ketidaksesuaian antara apa yang dikehendaki dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan social dan dalam hubungan perekonomian sehari-hari. Perilaku ini merupakan ekspresi potensi manusia yang bersifat destruktif. Dengan demikian, dari segi keterlibatan aktor-aktornya, konflik dapat bermula dari individu, rumah tangga, kelompok dan bahkan antar negara.

Sementara Charles Watkins, salah seorang teoritis konflik, mengatakan:

> “konflik dapat terjadi karena adanya kondisi atau prasyarat sebagai berikut : pertama, ada dua pihak yang secara potensial dan praktis operasional dapat saling menghambat. Secara potensial, artinya mereka memiliki kemampuan untuk menghambat. Praktis operasional, artinya kemampuan tadi bisa diwujudkan dan ada didalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya secara mudah. Ini berarti kedua belah pihak tidak dapat menghambat atau

tidak melihat pihak lain sebagai hambatan, maka konflik tidak terjadi. Kedua konflik dapat trjadi bila ada suatu sasaran yang sama-sama dikejar kedua belah pihak namun hanya salah satu yang mungkin akan mencapainya"(1992: 19-21).

Dilihat dari tahapan, konflik dapat dibagi dalam lima tahapan yaitu:

1. *Peaceful stable situations*, adalah suatu situasi dimana masing-masing actor dapat menjaga situasi dengan menyembunyikan berbagai perbedaan yang ada.
2. *Political tentions situations*, adalah suatu keadaan dimana masing-masing actor saling bersitegang walaupun keduanya tidak sampai meggunakan kekerasan.
3. *Violent political conflict*, situasi dimana ketegangan semakin memuncak, maka masing-masing pihak cenderung saling menggunakan kekerasan untuk saling mencederai bahkan saling membunuh.
4. *low intensity conflict*, adalah situasi dimana penggunaan kekerasan dari masing-masing pihak secara terbuka namun dengan intensitas terbatas.
5. *High intensity conflict*, konflik yang sudah mengacu kepada perang terbuka antara kelompok/Negara dengan intesitas tinggi yang mengarah pada kehancuran missal (Watkins, 1992: 19-21)

Hubungan antara dua pihak atau lebih yang tidak memiliki arah yang tidak sejalan menyebabkan konflik tersebut terjadi karena sasaran sasaran yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak bertentangan atau tidak sejalan. Dimana contoh nyatanya dapat kita lihat pada konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel, dimana keduabelah pihak belum mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada, karena sasaran yang ingin dicapai beda dan tidak sejalan sehingga muncul konflik antar keduanya.

Dalam realitasnya, konflik dapat berwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari yang bersifat lunak hingga bentuk yang terbuka dan memuat kekerasan yaitu: ketidaksukaan, ketidaksepakatan, ketidaksetujuan, perseturuan, persaingan permusuhan, oposisi, kontak fisik dan bahkan perang terbuka.

Dalam buku T May Rudy, Holsti mengungkapkan bagaimana cara menyelesaikan konflik:

1. Melakukan penarikan tuntutan.
   Penyelesaiannya adalah salah satu atau kedua belah pihak menahan diri untuk tidak tindakan fisik atau mendesak perundingan memenuhi tuntutan, atau menghentikan tindakan yang pada dasarnya akan menyebabkan tindakan balasan yang bermusuhan. Intinya bahwa salah satu pihak mengakhiri klaim atau tuntutan dan pihak lain menerima.
2. Penaklukan.
   Akhir penaklukan dengan kekerasan tetap mencakup berbagai persetujuan dan perundingan diantara negara yang bermusuhan.
3. Tunduk atau membentuk *Deterence* (penangkalan)
   Kriteria yang dipakai untuk membedaan kepatuhan atau penangkalan dari penaklukan ialah ada atau tidak adanya implementasi ancaman untuk memakai kekerasan. Meskipun tidak terjadi kekerasan, perlu diketahui bahwa sikap tunduk merupakan akibat dari penerapan ancaman militer sebagai bentuk penyelesaian konflik cara tidak damai. Pihak yang melakukan penangkalan atau penundukan akan menunjukan kepada pihak lain bahwa kemungkinan resiko untuk melanjutkan tindakan atau mempertahankan tuntutan akan lebih besar disbanding melakukan kembali tuntutannya dan menghentikan sama sekali tindakannya.
4. Kompromi.
   Kompromi adalah penyelesaian konflik atau krisis internasional yang menuntut pengorbanan dari posisi yang telah diraih oleh pihak yang bersengketa. Masalah utama dalam mencapai kompromi adalah bagaimana meyakinkan pihak yang bersengketa untuk menyadari bahwa resiko untuk tetap mempertahankan atau melanjutkan konflik diantara mereka jauh lebih besar disbanding resiko untuk melakukan penurunan tuntutan atau menarik mundur posisi militer dan diplomatik.
5. Penyelesaian melalui pihak ketiga.
   Akibat yang agak rumit dari penyelesaian konflik atau krisis internasional berdasarkan kompromi ialah penyelesaian melalui pihak ketiga. Bentuk penyelesaian seperti ini mencakup penyerahan persetujuan dan itikad untuk menyelesaikan masalah berdasarkan berbagai criteria keadilan.
6. Penyelesaian secara damai
   Penyelesaian melalui cara-cara damai (perundingan, konsiliasi, dan lain-lain) sehingga masing-masing pihak yang bersengketa secara perlahan dapat menerima keadaan posisi yang baru (2005: 77-78).

Konflik adalah aspek yang tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai informasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Adalah mungkin mengubah respon kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan tepat.